Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA NAIMATA-TAEBENU DI KOTA KUPANG

Elisabeth Novrianti Mael[1], Mey Astri Monika Koli[2], Nurul Azizah Muslimin[3], George Yohanes Krisostomus Sasi[4], Marisa Wilmince Parera[5], Maria Nadia Sebhu[6], Lasarus Jehamat[7], Yeheskial A. Roen[8], Helga M. E. Gero[9]

[123456789] Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available Januari, 2026

nenimael559@gmail.com,
marisapareraatb@gmail.com,
sasigeorge579@gmail.com,
meykoly78@gmail.com,
marianadiasebhu@gmail.com,
nurullazizahh0813@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini juga rentan terhadap berbagai permasalahan tata kelola, termasuk potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan rendahnya kualitas hasil pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu di Kota Kupang dengan menitikberatkan pada aspek pengawasan, transparansi, dan upaya pencegahan korupsi dalam proyek infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap pelaksanaan proyek. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu telah dilaksanakan dengan pengawasan berlapis dan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan proyek masih menghadapi tantangan teknis, administratif, dan sosial, seperti kondisi geografis yang rawan bencana, cuaca ekstrem, serta dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berintegritas.

Kata kunci: pembangunan jalan raya, pencegahan korupsi, tata kelola pemerintahan, pengawasan proyek, Kota Kupang

A B S T R A C T

Road infrastructure development is one of the key priorities of local governments to support regional connectivity, community mobility, and economic growth. However, this sector is also vulnerable to governance issues, including potential budget mismanagement and low construction quality. This study aims to analyze the implementation of the Naimata-Taebenu Road Development Project in Kupang City, focusing on supervision mechanisms, transparency, and corruption prevention efforts in infrastructure projects. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation review related to project implementation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Naimata-Taebenu Road Project has been implemented with multi-layered supervision and in accordance with the principles of good governance, particularly in terms of transparency and budget accountability. Nevertheless, the project faces several technical, administrative, and social challenges, such as disaster-prone geographical conditions, extreme weather, and social impacts on surrounding communities. This study concludes that strengthening supervision,

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



increasing community participation, and integrating disaster mitigation into infrastructure planning are essential to achieving high-quality, sustainable, and integrity-based road development.

***Keywords**: road infrastructure development, corruption prevention, good governance, project supervision, Kupang City.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Jalan raya yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi aktivitas sosial, perdagangan, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas tenaga kerja. Keberadaan infrastruktur jalan yang berkualitas berkontribusi langsung terhadap efisiensi biaya logistik, pemerataan pembangunan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor pembangunan jalan raya memperoleh perhatian serius dari pemerintah, yang tercermin dari besarnya alokasi anggaran yang disediakan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun memiliki peran strategis, sektor pembangunan jalan raya juga merupakan salah satu bidang yang paling rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai laporan dari lembaga pengawas pembangunan dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa proyek-proyek infrastruktur kerap menjadi sasaran penyimpangan karena melibatkan anggaran besar, proses pengadaan yang kompleks, serta banyaknya aktor yang terlibat dalam setiap tahapan proyek. Praktik korupsi dapat terjadi sejak tahap perencanaan dan penganggaran, proses tender dan penunjukan penyedia jasa, hingga pelaksanaan konstruksi dan pengawasan proyek. Modus yang umum ditemukan antara lain mark-up anggaran, pengurangan volume pekerjaan, penggunaan material di bawah standar teknis, proyek fiktif, suap dalam proses lelang, serta manipulasi laporan dan dokumen pertanggungjawaban.

Dampak dari praktik korupsi dalam proyek pembangunan jalan raya tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara atau daerah, tetapi juga berimplikasi langsung pada kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. Jalan yang dikerjakan tanpa memenuhi standar teknis cenderung memiliki umur pakai yang pendek, mudah mengalami kerusakan, dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Kondisi ini pada akhirnya membebani anggaran publik di masa mendatang serta meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunnya keselamatan pengguna jalan. Lebih jauh lagi, korupsi dalam proyek infrastruktur dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahkan legitimasi kebijakan publik, dan menghambat upaya pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pencegahan korupsi dalam pembangunan infrastruktur jalan raya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya pencegahan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, integritas, serta penegakan hukum yang konsisten. Transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek memungkinkan publik untuk mengetahui informasi terkait anggaran, spesifikasi teknis, dan progres pekerjaan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap aktor yang terlibat bertanggung jawab atas kewenangan dan keputusan yang diambil, sementara integritas menjadi landasan etis dalam pelaksanaan proyek.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Selain peran pemerintah, keterlibatan masyarakat dan media massa dalam pengawasan partisipatif juga merupakan strategi penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Partisipasi publik dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan proyek, melaporkan indikasi penyimpangan, serta mendorong keterbukaan informasi. Media massa berperan dalam menyebarluaskan informasi, membangun kesadaran publik, dan menekan pemerintah serta pelaksana proyek agar bekerja secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan aktor eksternal yang independen.

Dalam konteks lokal, proyek pembangunan Jalan Raya Naimata–Jalan Taibenu di Kota Kupang merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang dibiayai melalui APBD Kota Kupang dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), dengan nilai anggaran sekitar Rp13–13,5 miliar. Besarnya anggaran tersebut menjadikan proyek ini memiliki potensi risiko penyimpangan yang cukup tinggi apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang memadai. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas konstruksi yang sesuai dengan standar teknis.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proyek Jalan Raya Naimata–Jalan Taibenu tidak hanya penting untuk mencegah kerugian keuangan daerah, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik pengelolaan infrastruktur yang bersih dan berintegritas, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, kajian mengenai upaya pencegahan korupsi dalam proyek pembangunan jalan raya ini menjadi penting untuk dilakukan, baik sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan dan praktik pembangunan infrastruktur di daerah, maupun sebagai kontribusi akademik dalam memperkuat sistem antikorupsi pada sektor infrastruktur. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan jalan raya yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan terbuka, sehingga memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap realitas sosial yang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipandang tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, proses, serta dinamika sosial yang berkembang dalam konteks penelitian. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2010: 213), dalam penelitian kualitatif teori yang digunakan bersifat sementara dan akan berkembang seiring dengan proses pengumpulan serta analisis data di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan penelitian kualitatif, yaitu menekankan pada data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, narasi, dan informasi mendalam dari subjek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengolah dan menafsirkan data secara sistematis agar mampu menggambarkan fenomena penelitian secara utuh dan komprehensif.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilah, dan memilih data-data yang

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan perhatian pada informasi yang dianggap penting, mengidentifikasi tema dan pola tertentu, serta mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, baik pada saat pengumpulan data maupun setelah data terkumpul.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun dan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks yang sistematis. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan informasi yang diperoleh, melihat keterkaitan antar data, serta merencanakan langkah analisis selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah terbentuk.

Tahap ketiga adalah verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk memperoleh makna dan temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan bertambahnya data serta proses analisis yang berkelanjutan. Namun, kesimpulan akhir diharapkan mampu menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, baik berupa deskripsi yang lebih jelas mengenai objek penelitian, hubungan kausal atau interaktif antarfenomena, maupun pengembangan konsep atau teori tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2009: 338–345) yang menyatakan bahwa temuan penelitian kualitatif dapat memperjelas fenomena yang sebelumnya belum dipahami secara utuh.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, sistematis, dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, serta menghasilkan temuan yang memiliki relevansi teoritis dan praktis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Proyek Pembangunan Jalan Raya Naimata-Taebenu

Proyek pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal. Jalan ini memiliki peran penting sebagai penghubung antarpermukiman dan sebagai akses utama menuju pusat-pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Kerusakan parah yang terjadi pasca Badai Seroja tahun 2021 menjadikan ruas jalan ini tidak lagi layak digunakan, sehingga pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan kembali dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Kupang melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai sekitar Rp13–13,5 miliar.

Pembangunan jalan ini tidak hanya dimaknai sebagai proyek fisik semata, tetapi juga sebagai upaya pemulihan pascabencana dan bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan infrastruktur publik yang aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proyek ini dirancang dengan pendekatan teknis yang lebih komprehensif dan memperhatikan aspek tata kelola yang baik.

Pelaksanaan Teknis Pembangunan Jalan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu dilakukan melalui beberapa tahapan teknis yang sistematis. Tahapan tersebut meliputi pekerjaan persiapan, pembersihan lokasi, perbaikan dan penguatan badan jalan, pembangunan sistem drainase, serta pengaspalan. Pemerintah daerah bersama pihak kontraktor dan konsultan pengawas menekankan pentingnya kualitas konstruksi agar jalan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap faktor alam, khususnya curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil.

Pembangunan tidak hanya berfokus pada permukaan jalan, tetapi juga pada struktur pendukung seperti bronjong penahan lereng dan normalisasi aliran air. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kerusakan jalan sebelumnya tidak hanya disebabkan oleh beban lalu

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



lintas, tetapi juga oleh faktor lingkungan dan geografis. Dengan demikian, pendekatan teknis yang digunakan bertujuan untuk meminimalkan risiko kerusakan berulang dan meningkatkan umur teknis jalan.

Pengawasan dan Pengendalian Proyek

Pengawasan proyek merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan dan pencegahan penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis oleh berbagai pihak, mulai dari pengawas lapangan, konsultan supervisi, hingga instansi pemerintah terkait seperti Dinas PUPR dan DPRD Kota Kupang. Pengawasan ini mencakup aspek teknis, administratif, dan keuangan.

Secara teknis, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan mutu material, kesesuaian pekerjaan dengan desain teknis, serta pengujian kualitas konstruksi. Secara administratif, setiap tahapan pekerjaan didokumentasikan dalam laporan harian, mingguan, dan bulanan yang memuat progres fisik dan penggunaan anggaran. Mekanisme ini memungkinkan adanya kontrol yang ketat terhadap jalannya proyek serta memudahkan proses evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Dari aspek keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran proyek diawasi secara ketat untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pencairan dana dilakukan secara bertahap berdasarkan capaian progres pekerjaan yang telah diverifikasi oleh pengawas. Sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran maupun penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sistem lelang elektronik (LPSE) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan eksternal juga dilakukan melalui audit oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan mekanisme tersebut, proyek pembangunan jalan ini berupaya dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangan dalam Pelaksanaan Proyek

Meskipun pengawasan dan perencanaan telah dilakukan secara optimal, pelaksanaan proyek tetap menghadapi berbagai tantangan. Tantangan teknis yang paling dominan adalah kondisi geografis yang rawan longsor serta cuaca ekstrem yang sering menghambat proses pekerjaan. Curah hujan tinggi menyebabkan keterlambatan pengerjaan dan berpotensi merusak bagian konstruksi yang belum selesai.

Selain itu, tantangan administratif juga muncul dalam bentuk koordinasi antarinstansi dan penyesuaian jadwal kerja dengan kondisi lapangan. Keterbatasan pasokan material dan perawatan alat berat juga menjadi kendala yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan proyek. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana memerlukan perencanaan yang fleksibel dan adaptif.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu turut membawa dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Selama proses pembangunan, masyarakat mengalami gangguan berupa debu, kebisingan, dan pengalihan arus lalu lintas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com

masyarakat pada umumnya dapat menerima kondisi tersebut karena memahami pentingnya proyek bagi kepentingan jangka panjang.

Dari sisi lingkungan, pembangunan sistem drainase dan penguatan lereng diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan longsor di masa mendatang. Oleh karena itu, proyek ini tidak hanya berdampak pada peningkatan aksesibilitas, tetapi juga pada upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

Upaya Pencegahan Korupsi dalam Proyek Infrastruktur

Dalam konteks pencegahan korupsi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu telah mengadopsi berbagai mekanisme preventif, seperti transparansi anggaran, pengawasan berlapis, serta audit internal dan eksternal. Pencegahan korupsi juga diperkuat melalui sistem pengendalian internal pemerintah dan kebijakan nasional yang mendorong integritas dalam pengelolaan proyek infrastruktur.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada komitmen dan integritas para aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan etika kerja, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan infrastruktur yang bersih dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan proyek. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sistem pengawasan berbasis komunitas.

Dengan demikian, proyek ini dapat dipandang sebagai contoh penting dalam memahami dinamika pembangunan infrastruktur di tingkat daerah, khususnya terkait dengan tantangan teknis, sosial, dan tata kelola. Pembelajaran dari proyek ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembangunan infrastruktur jalan raya lainnya agar lebih berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu, dapat disimpulkan bahwa proyek ini merupakan upaya strategis Pemerintah Kota Kupang dalam memulihkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pascabencana serta mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik jalan, tetapi juga memperhatikan aspek struktural dan lingkungan, seperti perbaikan drainase dan penguatan lereng, sehingga diarahkan untuk menghasilkan konstruksi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Dari sisi tata kelola, proyek pembangunan Jalan Raya Naimata–Taebenu telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui keterlibatan pengawas lapangan, konsultan supervisi, Dinas PUPR, DPRD, serta lembaga pengawasan internal dan eksternal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta pencairan anggaran berbasis progres pekerjaan menjadi instrumen penting dalam meminimalkan potensi penyimpangan dan praktik korupsi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Meskipun demikian, pelaksanaan proyek masih menghadapi berbagai tantangan, baik teknis, administratif, maupun sosial. Kondisi geografis yang rawan longsor, cuaca ekstrem, serta keterbatasan pasokan material menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sisi lain, dampak sosial dan lingkungan yang muncul selama proses pembangunan menuntut adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko dan membangun kepercayaan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian proyek pembangunan infrastruktur, baik dari aspek teknis, administratif, maupun keuangan, dengan memastikan konsistensi penerapan standar kualitas dan transparansi anggaran. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengawas lapangan dan aparatur teknis, juga menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Kedua, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan jalan raya. Pemerintah dapat membuka ruang pengaduan dan pelaporan publik yang mudah diakses serta melibatkan masyarakat dan media dalam pemantauan proyek, sehingga tercipta kontrol sosial yang lebih kuat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Ketiga, dalam menghadapi tantangan geografis dan risiko bencana, perencanaan pembangunan jalan ke depan perlu semakin mengintegrasikan aspek mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan teknologi konstruksi yang adaptif terhadap kondisi alam serta perencanaan drainase yang lebih matang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan infrastruktur jalan.

Keempat, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan evaluasi pascaproyek secara berkala guna menilai kualitas hasil pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan praktik pembangunan infrastruktur di masa mendatang agar lebih efisien, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andi, S. (2020). Korupsi dalam proyek infrastruktur jalan: Analisis mekanisme pengawasan dan celah penyimpangan anggaran. *Jurnal Administrasi Publik, 8*(2), 115–128.

Antara News. (2025). Wali Kota Kupang pastikan perbaikan Jalan Taebenu dimulai Mei 2025. *Antara NTT*.

Detik Bali. (2024). Cuaca buruk di Kupang, Jalan Taebenu terancam putus. *Detik.com*.

GalaPos ID. (2025). Empat tahun terbengkalai, Jalan Taebenu–Naimata diperbaiki.

Harahap, R., & Fathurrahman, A. (2021). Peran *good governance* dalam pencegahan korupsi sektor konstruksi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9*(1), 45–59.

Infontt.com. (2025). Proyek ruas Jalan Taebenu menggunakan konstruksi khusus, Lurah Oebufu ucap terima kasih.

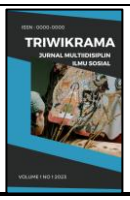
Kupang News. (2024). Rusak akibat longsor, Jalan Taebenu akan diperbaiki tahun 2025.

Kupang News. (2025). Jalan Taebenu akan dikerjakan dengan anggaran Rp13,5 miliar.

Lintas NTT. (2022). Dibiarkan rusak selama 16 bulan, Jalan Taebenu mulai diperbaiki.

Lintas News NTT. (2024). Ambles sedalam 1 meter, Jalan Taebenu akan diperbaiki.

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com



NTT Hits. (2025). KPK temukan selisih volume pondasi Rp2 miliar dalam *probity audit* proyek Jalan Taebenu.

Ranaka News. (2024). Kerusakan Jalan Taebenu Kali Liliba terjadi akibat berbagai faktor.

Siahaan, T. (2019). Kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan upaya pencegahannya. *Jurnal Antikorupsi Indonesia, 5*(2), 77–90.

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Timex Kupang. (2024). Jalan Taebenu yang amblas segera dikerjakan.

Timex Kupang. (2025). KPK temukan kelebihan dana Rp2 miliar pada proyek pekerjaan Jalan Taebenu.

Victory News. (2025). Dinas PUPR Kota Kupang diberi peringatan keras kelola proyek perbaikan Jalan Taebenu secara benar dan tepat sasaran.